

RINGKASAN

Tesis ini mendeskripsikan kenyataan yang cukup populer bagi sarjana yang berminat pada studi partisipasi politik di Indonesia, dimana merupakan sebuah kenyataan babak perkembangan sarjana modern partisipasi politik perempuan di Indonesia era transisi.

Partisipasi perempuan dapat dikatakan menjadi diskursus penting dalam studi politik bersamaan dengan munculnya babak baru paradigma pembangunan ekonomi-politik di Indonesia, yang disebut era pembangunanisme. Namun, istilah partisipasi merujuk pada keterlibatan perempuan dalam mengisi pembangunan di luar sektor politik aktif. Dengan demikian perempuan selama ini umumnya memasuki sektor domestik. Partisipasi identik dengan keterlibatan perempuan dalam ruang domestik-publik dalam bidang ekonomi-politik. Namun kenyataannya selama ini partisipasi politik perempuan hanya dalam keluarga, ekonomi pedesaan, peningkatan kesejahteraan reproduksi dan lain-lain.

Secara arkeologi, diskursus partisipasi politik perempuan mulai bergeser pasca munculnya transisi demokrasi, sejak terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden sejak tanggal 20 Oktober 1999. Sejak itu, diskursus partisipasi politik perempuan mulai mengarah pada pembentukan unit wacana baru, partisipasi politik perempuan mulai mendapat keterwakilan yang proporsional. Dari sinilah, muncul diskursus dominan ke ruang publik tentang kebutuhan representasi politik perempuan melalui kuota minimal 30%.

Kuota ditunjukkan oleh terakomodasinya politik perempuan di lembaga-lembaga legislatif atau lembaga pembuat keputusan lainnya. Sebagai bentuk *affirmative action*nya. Hal itu dipandang perlu karena hanya dengan keterwakilan secara memadai di lembaga-lembaga tersebut perempuan dapat berperan aktif merubah kebijakan-kebijakan publik yang mendiskriminasikan kaum perempuan.

Diskursus yang dianggap netral berkaitan dengan partisipasi politik perempuan tersebut, ternyata memiliki motif kekuasaan luar biasa bila dikaitkan dengan diskursus pembangunanisme.

Secara genealogis, keterkaitan antara partisipasi politik perempuan dan pembangunanisme ternyata mengandaikan kekuasaan "penjinakan" melalui pelembagaan dan sistematisasi yang cukup rumit. Kuasa penjinakan dilakukan dengan membangun diskursus negara-negara terbelakang, negara berkembang atau negara Dunia Ketiga, yang di kalangan lembaga-lembaga akademik disebut sebagai "*underdeveloped countries*". Diskursus tersebut sebagai jembatan untuk menyakinkan negara-negara berkembang untuk bersedia menerima secara kompromistis terhadap ideologi pembangunanisme. Intinya, tiga pilar yang diusung yakni pertumbuhan, perencanaan, dan bantuan, dan seluruh konseptualisasinya memiliki motif intervensi manipulasi.

Dalam pembangunan ini ternyata juga memproduksi kuasa yang negatif bagi partisipasi politik perempuan. Diskursus partisipasi politik

perempuan yang terusung bersamaan dengan diskursus pembangunanisme tidak lebih sebagai mekanisme kerja kekuasaan untuk melanggengkan dominasi dan penindasan perempuan di Dunia Ketiga, melalui upaya penjinakan (*cooptation*) dan pengekangan (*regulation*) terhadap perempuan.

Diskursus kuota perempuan misalnya, digulirkan dengan terlebih dahulu memproduksi wacana perempuan dalam pembangunan (*Women In Development/WID*), perempuan dan pembangunan (*Women And Development*), dan gender dan pembangunan (*Gender And Development*), yang ketiga-tiganya diambil dari konsep negara dunia maju atau dunia pertama (*development countries*). Dengan program tersebut, kuota perempuan diharapkan mendapatkan institusinya sehingga mendominasi wacana, pemikiran serta bentuk-bentuk proyek yang terfokus pada perempuan di lapangan. Tak lupa, mekanisme global tersebut juga telah melahirkan para ahli, konsultan, serta menjamurnya pusat studi perempuan di berbagai universitas.

Dalam bahasa hegemoni, diskursus WID, WAD, maupun GAD di negara-negara berkembang maupun di kalangan gerakan-gerakan perempuan di dalamnya telah mendapatkan konsensus yang diperoleh oleh negara Barat dengan tanpa melalui penindasan terhadap negara berkembang tersebut. Konsensus tersebut diperoleh melalui negara yang ditunjukkan kemauan negara membentuk Departemen yang secara khusus mengurus perempuan dan pembangunan. Konsensus juga diperoleh melalui LSM-LSM lokal yang secara terbuka menerima proyek-proyek lapangan dari program WID, WAD, GAD maupun universitas-universitas, dan para konsultan ahli lokal. Melalui berbagai media, negara berkembang digiring untuk memandangi WID, WAD, maupun GAD dalam "mainstream" yang telah dibakukan oleh negara Barat.

Praktek hegemoni juga nampak jelas terusung dalam diskursus partisipasi politik perempuan. Diskursus tersebut mengandaikan pelanggengan hegemoni melalui diskursus yang dibangun oleh intelektual organik atau hasil-hasil riset produk sarjana Barat.

ABSTRACT

Women's participation is considered as a crucial discourse in political studies along with the rise of new order economical paradigm in Indonesia, developmentalisme era. However, the term of participation refers to women's involvement in development partaking outside active politic sectors. Participation is identical with women's involvement in domestic and economical space, rural economic, and the increase of reproduction health, and so on.

Archeologically, discourse of women's political participation was starting to shift after the rise of democratic transition, from the time Gus Dur elected as the president on October 20, 1999. After since, the discourse of women's political participation has lead to forming new unit of discourse, women's political participation through proportional representative. From this point, it emerges dominant discourse into public space concerning the need of women's political representation through 30% of minimal quota.

Quota is indicated that women's politics is accommodated in legislative institutions or other institutions of decision makers, as a from of affirmative action. It is viewed as an important role because only by properly represented in such institutions women play actively to change public policies which discriminate women community.

Discourse which is considered as neutral that related to the women's political participation, in fact, it has a motive of remarkable power if it is related to developmentalism discourse. Genealogically, the relationship of women's political participation and developmentalism, in fact, relies on the power of "domestication" through institutional and complex systematic. The power of domestication is conducted by developing discourse of undeveloped countries, or third world countries, which in scholar community are called as "underdeveloped countries."

Quota discourse for women, for instant, is exposed by initially producing the discourse of Women In Development (WiD), Women And Development (WAD), and Gender And Development (GAD) which the three discourse are depicted from development countries of first-world countries. With the programs, women quota is expected to get institutions so as they are dominant in discourse, thought, and projects that focus on women in the field.

Keywords: Gender, Hegemony, Political Participation.